

KONSEP PENDIDIKAN ISLAM MULTIKULTURAL DALAM MENCIPTAKAN HARMONISASI KELEMBAGAAN

M. Muizzuddin

Institut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA) Manyar Gresik

E-mail: muhammadmuizzuddin84@gmail.com

Ahsantudhonni

Institut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA) Manyar Gresik

E-mail: ahsanghozali@gmail.com

Abstract: This study will discuss the Concept of Multicultural Islamic Education in Creating a Harmonious Institutional System: A Case Study in the Madrasah Aliyah Mamba'us Sholihin Suci-Manyar-Gresik. In theory, Institutions are the rules that apply in society that are agreed upon by community members as something that must be followed and obeyed (having the power of sanctions) with the aim of creating order and certainty of interactions among community members. In this article we will describe the initial concept of the values of multicultural Islamic education, then we will describe the concept of an institutional system, and end with a presentation of the results of research on the Role of Multicultural Islamic Education in Creating a Harmonious Institutional System. This study uses an interpretive paradigm with a qualitative approach, a type of case study. Collecting data using unstructured interview techniques, non-participant observation, and documentation study. This study found the conclusion that the values of multicultural Islamic education that developed in the institution helped make the institution into harmony. These values include *At-Tawassuth* (moderate), *At-Tasamuh* (tolerant), *At-Ta'arun* (please-help), and *At-Tawazun* (harmony).

Keywords: Institutional, Multicultural Islamic Education Values

Pendahuluan

Sudut pandang keilmuan akan berbeda pendefinisian kelembagaan menurut berbagai macam ilmuan, hal tersebut tidak

terlepas dari biografi dan latar belakangnya. Doglas North misalnya, mendefinisikan kelembagaan sebagai batasan-batasan yang dibuat untuk membentuk pola interaksi yang harmonis antara individu dalam melakukan interaksi politik, sosial dan ekonomi, pandangan tersebut tidak terlepas dari biografi sejarawan ekonomi terkemuka pada masanya.¹ Begitu juga Schmid North yang mengartikan bahwa kelembagaan merupakan sejumlah peraturan yang berlaku dalam sebuah masyarakat, kelompok atau komunitas, yang mengatur hak, kewajiban, tanggung jawab, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Schotter mengemukakan bahwa kelembagaan merupakan regulasi atas tingkah laku manusia yang disepakati oleh semua anggota masyarakat dan merupakan penata interaksi dalam situa tertentu yang berulang.²

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Jack Knight mengartikan kelembagaan sebagai suatu serangkaian peraturan yang membangun struktur interaksi dalam sebuah komunitas.³ Kelembagaan juga bisa berarti aturan yang berlaku dalam masyarakat (arena) yang menentukan siapa yang berhak membuat keputusan, tindakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, aturan apa yang berlaku umum di masyarakat, prosedur apa yang harus diikuti, informasi apa yang mesti atau tidak boleh disediakan dan keuntungan apa yang individu akan terima sebagai buah dari tindakan yang dilakukannya.⁴ Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa, kelembagan merupakan aturan main yang berlaku dalam masyarakat yang disepakati oleh anggota masyarakat sebagai sesuatu yang harus diikuti dan dipatuhi (memiliki kekuatan sanksi) dengan tujuan terciptanya keteraturan dan kepastian interaksi sesama anggota masyarakat. Interaksi yang dimaksud terkait dengan kegiatan ekonomi, politik maupun sosial.

Kelembagaan jika dilihat dari bentuknya terbagi menjadi dua, yakni kelembagaan yang informal dan kelembagaan yang formal. Kelembagaan informal merupakan kelembagaan yang keberadaannya

¹ D. C. North, *Institutions, Institutional Change and Economics Performance*, (Cambridge University Press, 1990), hlm. 17.

² A. Schotter, *The Economic Theory of Social Institutions*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1981), hlm. 82.

³ Andrew Schotter, *The Economic Theory of Social Institutions*, (New York: Cambridge University Press, 1981) hlm. 78.

⁴ E. Ostrom, *Governing of the Common. The Evolution of Institutions for Collective Action*, (Cambridge University Press, 1990).

di masyarakat umumnya tidak tertulis: adat istiadat, tradisi, pamali, kesepakatan, konvensi dan sejenisnya dengan beragam nama dan sebutan dikelompokan sebagai kelembagaan informal. Sedangkan kelembagaan formal yakni peraturan tertulis seperti perundang-undangan, kesepakatan (*agreements*), perjanjian kontrak, peraturan bidang ekonomi, bisnis, politik dan lain-lain. Kesepakatan-kesepakatan yang berlaku baik pada level international, nasional, regional maupun lokal termasuk ke dalam kelembagaan formal.⁵

Hari ini, Pendidikan tinggi merupakan lembaga/institusi dalam pengertian organisasi. Terdapat struktur kepengurusan di mana Siswa, Guru dan pegawai merupakan anggota dari organisasi tersebut. Tujuannya yakni agar guru bisa mendidik siswa menjadi manusia pandai; bermoral dan punya integritas diri; belajar dan menyebarkan hasil belajar tersebut agar ilmu pengetahuan terus berkembang; mengadakan pengabdian sebagai kesempatan untuk mengimplementasikan hasil belajarnya pada masyarakat; dan mensejahterakan stakeholder sekolah, sehingga tujuan tersebut dapat berjalan dengan baik. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan aturan main yang jelas di mana setiap stakeholder dengan penuh kesadaran merasa terikat dan bertanggungjawab untuk melaksanakan aturan main itu dengan baik.⁶

Penguatan kapasitas kelembagaan, di sisi lain, merupakan suatu pendekatan pembangunan di mana semua orang (pihak) memiliki hak yang sama terhadap sumberdaya, dan menjadi perencana pembangunan bagi diri mereka. Menurut Eade dalam Tony, pengembangan kapasitas kelembagaan terfokus pada lima isu pokok yakni pertama Penguatan kapasitas kelembagaan sering digunakan secara sederhana untuk menjadikan suatu lembaga lebih efektif mengimplementasikan proyek pembangunan. Kelembagaan merupakan instrumen untuk mencapai tujuan tertentu,

Kedua, Penguatan kapasitas kelembagaan dapat juga menunjuk pada upaya yang mendukung organisasi untuk menjadi katalis dialog dan atau memberikan kontribusi dalam mencapai alternatif pembangunan. Pandangan ini menekankan peran mendemokratisasikan organisasi pemerintah dan organisasi berbasis masyarakat dalam masyarakat madani.,

⁵ D. C. North, *Institutions*, hlm. 53

⁶ M. Muizzuddin, "Pendidikan Humanis dalam Perspektif Islam (Implementasi Nilai-Nilai Ketauhidan dalam Pembelajaran)." JALIE; Journal of Applied Linguistics and Islamic Education 1, no. 1 (2017): 115-132.

Ketiga, Jika penguatan kapasitas kelembagaan yakni suatu cara untuk mencapai tujuan, kemudian tujuan yang dimaksudkan oleh lembaga-lembaga yang ikut serta, maka harus dinyatakan secara eksplisit agar dapat membandingkan berbagai pilhan atau mengevaluasi kemajuannya,

Keempat, Jika penguatan kapasitas kelembagaan merupakan tujuan akhir (misalnya memperkuat kualitas suatu pengambilan keputusan), maka pilhan tersebut membutuhkan tujuan yang jelas dan analisis kontekstual terhadap unsur-unsur kelembagaan. Fokusnya yakni misi organisasi yang berimbang, dan terakhir, Keterkaitan dengan lingkungan eksternal, struktur dan aktivitasnya. Kriteria efektivitasnya akan berhubungan dengan faktor luar di mana misi itu dirasakan tepat, masuk akal dan terpenuhi.⁷

Menurut Sumpeno, penguatan kapasitas merupakan suatu proses peningkatan atau perubahan perilaku individu, organisasi dan sistem masyarakat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Penguatan kapasitas yakni perubahan perilaku untuk Meningkatkan kemampuan individu dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap; Meningkatkan kemampuan kelembagaan dalam organisasi dan manajemen, finansial dan kultur; dan Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam kemandirian, keswadayaan dan mengantisipasi perubahan.

Sumpeno juga menilai bahwa hasil yang diharapkan dengan adanya penguatan kapasitas kelembagaan yakni: (a) penguatan individu, organisasi dan masyarakat; (b) terbentuknya model pengembangan kapasitas dan program; dan (c) terbangunnya sinergisitas pelaku dan kelembagaan. Mengacu pendapat tersebut di atas, terdapat dua fokus dalam penguatan kapasitas, yaitu: perubahan perilaku, dan strategi dalam penguatan kelembagaan untuk mengatasi masalah dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Adanya strategi penguatan kapasitas kelembagaan diharapkan pemberdayaan masyarakat secara institusional maupun secara individu dapat terwujud. Di dalam penguatan kapasitas kelembagaan, kerjasama antar pihak menjadi sangat penting, dalam hal ini kerjasama pemerintah, swasta dan *Non Goverment Organization* (Lembaga Pengembangan Masyarakat) serta masyarakat itu sendiri.

⁷ Daniel E. Hebdng dan Leonard Glick, *Introduction to Sociology: A Text with Readings*, (Pilipina: Hill Inc dan Philipine Graphic Art Inc, 1994), hlm. 34.

Pembahasan

Pembahasan Artikel berikut ini akan kami paparkan beberapa aspek pembahasan yang akan kami jadikan menjadi beberapa fokus kajian sehingga diharapkan dalam pembahasan berikut dapat menemukan titik terang dalam kajian Konsep Pendidikan Islam Multikultural dalam Menciptakan Sistem Kelembagaan yang Harmoni: Studi Kasus di Lembaga Pendidikan Madrasah Aliyah Mamba'us Sholihin Suci-Manyar-Gresik. Dalam pembahasan pertama akan kami uraikan konsep awal tentang Nilai-nilai Pendidikan Islam Multikultural, selanjutnya akan kami paparkan tentang konsep sistem kelembagaan, dan diakhiri dengan paparan hasil penelitian tentang Peran Pendidikan Islam Multikultural dalam Menciptakan Sistem Kelembagaan yang Harmoni: Studi Kasus di Lembaga Pendidikan Madrasah Aliyah Mamba'us Sholihin Suci-Manyar-Gresik.

Nilai-nilai Pendidikan Islam Multikultural

Nilai-nilai Pendidikan Islam Multikultural merupakan nilai-nilai yang diambil dari Wahyu, berbeda dengan nilai-nilai pendidikan multikultural barat yang bersumber dari filsafat. Akantetapi keduanya tidak bertentangan sama sekali, satu dengan yang lain saling mendukung dan melengkapi. Ketika pendidikan multikultural lahir di barat merupakan bentuk protes atas pembedaan perlakuan dalam pendidikan.⁸ Banks mengungkapkan bahwa, pendidikan multikultural lahir atas dasar persamaan Ras, kultur dan Ekonomi. atas dasar tersebut Pendidikan Islam Multikultural tidak mempertentangkan pendidikan multikultural barat.⁹

Pendidikan Islam Multikultural menjunjung tinggi persamaan hak antar manusia, jika ditelisik lebih dalam dalam sejarah perkembangan islam di Madinah, Rasulullah telah mempersaudarakan Antara kaum Muhajirin, Ansor, dan Suku-suku yang berada dalam kota madina. Peristiwa tersebut terkenal dengan Piagam Madinah.¹⁰ Dalam Al-Qur'an juga Allah SWT telah berfirman yang artinya: *Hai*

⁸ Lihat James A. Banks and Cherry A. McGee Banks, *Multicultural Educational: Issues and Perspectives 7 ed.* (New Jersey: John Wiley & Sons, 2010) hal 16

⁹ Lihat James A. Banks and Cherry A. McGee Banks, *Multicultural..* hal 16

¹⁰ Lihat dalam Maskuri Bakri dan Dyah Werdiningsih, *Membumikan Nilai Karakter Berbasis Pesantren* (Jakarta: Nirma Media, 2017) hal 109-123

manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.¹¹

Penjelasan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa islam sangat menjunjung tinggi hak-hak tiap individu dan mendorong tiap individu agar bisa saling berinteraksi dan saling tolong menolong dalam segala hal dalam mewujudkan kehidupan yang harmoni. Hal tersebut senada dengan Tolhah Hasan dalam Pendidikan Multikultural. Beliau mengungkapkan bahwa, untuk saling mengenal dalam menumbuhkan sikap yang inklusif maka perlu kiranya dimulai dari sikap *At-Tawassuth* (moderat), *At-Tasamuh* (toleran), *At-Ta'arun* (tolong-menolong), dan *At-Tawazun* (harmoni).¹² Beliau juga menambahkan bahwa, nilai-nilai multikultural yang ada di masyarakat yakni komitmen untuk bisa hidup bersama, saling menghormati, berkerjasama, tolong-menolong, gotong royong dalam suasana hidup rukun dan damai.¹³

Sistem Kelembagaan

Kelembagaan dapat dimaknai sebagai *a complex of norm and behavior that persist overtime by serving some socially valued purpose*¹⁴ sedangkan organisasi merupakan struktur peran yang diakui dan diterima. Mengacu pada konsep kelembagaan yang diajukan oleh Gilin dan Gilin¹⁵ tentang tingkat kemantapan tertentu dari kelembagaan, Horton dan Hunt¹⁶ tentang rutinisasi dari kelembagaan, dan Uphoff dalam Saptana mengungkapkan bahwa kelembagaan sebagai pola perilaku yang stabil, dihargai dan berlaku dalam waktu yang lama, maka bagian pokok lainnya yang penting untuk diperhatikan dalam pembahasan mengenai kinerja kelembagaan yakni tentang pola

¹¹ QS. Al Hujurat Ayat 13

¹² Disarikan dari Muhammad Tholchah Hasan, *Pendidikan Multikultural: Sebagai Opsi Penanggulangan Radikalisme*, (Malang: Lembaga Penerbitan Universitas Islam Malang, 2016), hal. 60-70

¹³ Muhammad Tholchah Hasan, *Pendidikan ...* hal. 8-9

¹⁴ Norman Uphoff, *Local Institutions*

¹⁵ Gillin, J.L dan J.P. Gillin, *Cultural Sociology*. (New York: The Me Millan Co, 1954)

¹⁶ Paul B. Horton, Chester L. Hunt, *Sociology* (McGraw-Hill College, 1984)

perilaku atau pola interaksi yang terjalin antar pelaku dalam suatu kelembagaan.¹⁷

Kelembagaan merupakan kata yang merujuk pada sesuatu yang bersifat mantap yang hidup di dalam masyarakat.¹⁸ Secara konseptual, kata kelembagaan diambil dari istilah pranata yang mengandung pengertian sebagai padanan institution dan pranata sosial sebagai *social institution*. Suatu kelembagaan bisa mempunyai makna suatu pemantapan perilaku yang hidup pada suatu kelompok orang. Kelembagaan merupakan sesuatu yang stabil, mantap, dan berpola, berfungsi untuk tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat, ditemukan dalam sistem sosial tradisional dan modern atau bisa berbentuk tradisional dan modern, dan berfungsi untuk mengefisienkan kehidupan sosial.¹⁹

Jika dalam kelembagaan ekonomi terdapat beberapa aspek yang bisa dilihat dari pelaku yang mendukung dan mengonstruksi kelembagaan ekonomi tersebut sekaligus dengan status dan perannya, juga aturan main yang berlaku dan dikonstruksi oleh para pelaku.²⁰ Menurut Sudaryanto yang mengutip pendapat North bahwa kelembagaan ekonomi dibentuk oleh aturan-aturan formal berupa rule, laws, dan constitutions, dan aturan informal berupa norma, kesepakatan, dan lain-lain. Seluruhnya merupakan penentu bagaimana terbentuknya struktur masyarakat dan kinerja ekonominya yang spesifik.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Elizabeth yang mengutip dari Pakpahan bahwa suatu kelembagaan dicirikan oleh tiga hal utama, yaitu: (1) *yurisdiction of boundary* (batas yurisdiksi), (2) *property right* (hak kepemilikan), (3) *rule of representation* (aturan representasi).²¹ Perubahannya menghasilkan performance yang diinginkan, dan ditentukan oleh: (1) *sense of community* (perasaan sebagai satu

¹⁷ Saptana, dkk. *Transformasi Kelembagaan Tradisional*. (Bogor: PSEKP, 2003)

¹⁸ Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat: edisi ketiga, (Jakarta: Grafindo Pustaka Utama, 1997)

¹⁹ Farid Hamid dan Heri Budianto, *Ilmu Komunikasi: Sekarang dan Tantangan Masa Depan* (Jakarta: Kencana, 2011) hal 5

²⁰ Saptana, dkk. *Transformasi Kelembagaan Tradisional*. (Bogor: PSEKP, 2003)

²¹ Rosganda Elizabeth. *Penguatan dan Pemberdayaan Kelembagaan Petani Mendukung Pengembangan Agribisnis Kedelai*. (Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. PUSLITBANGTAN, 2010)

masyarakat), (2) eksternalitas, (3) homogenitas, dan (4) *economic of scale* (skala ekonomi).²²

Tiap kelembagaan memiliki tujuan tertentu, dan orang-orang yang terlibat di dalamnya memiliki pola perilaku tertentu serta nilai-nilai dan norma-norma yang sudah disepakati yang sifatnya khas. Tiap kelembagaan dibangun untuk satu fungsi tertentu. Karena itu kita mengenal kelembagaan pendidikan, kelembagaan ekonomi, agama, dan lain-lain. Jadi, dunia berisi kelembagaan-kelembagaan dan manusia pasti masuk kelembagaan tersebut.

Salah satu ciri umum kelembagaan yakni adanya suatu tingkat kekekalan atau kemapanan sehingga aturan main dalam suatu kelembagaan juga telah berlaku dalam waktu yang cukup lama, dan mungkin masih akan berlaku dalam jangka waktu yang lama lagi.²³ Namun jika mengacu pada pendapat Granovetter dan Swedberg yang menyatakan bahwa kelembagaan ekonomi dikonstruksikan secara sosial, maka juga tidak tertutup kemungkinan adanya konstruksi ulang mengenai aturan main yang berlaku.²⁴ Mengacu pada pendapat di atas, maka pembahasan mengenai aturan main dalam kelembagaan ini akan mencakup tentang aturan main itu sendiri dan perubahan-perubahan yang terjadi pada aturan main, serta bagaimana dan oleh siapa aturan main tersebut dikonstruksi.

Selain pengertian diatas, kelembagaan dapat juga dimaknai sebagai organisasi. Dalam aspek kelembagaan terdapat nilai, aturan, norma, kepercayaan, moral, ide, gagasan, doktrin, keinginan, kebutuhan, orientasi, dan lain-lain. Sementara aspek keorganisasian berisi struktur, peran, hubungan antar pesan, integrasi antar bagian, struktur umum, perbandingan struktur teksual dengan struktur riil, struktur kewenangan, hubungan kegiatan dengan tujuan, aspek solidaritas, keanggotaan, klik, profil, pola kekuasaan, dan lain-lain (Sudaryanto 2005).

Setelah memaparkan beberapa pandangan ahli dapat disimpulkan bahwa kelembagaan merupakan jejaring yang terbentuk dari sejumlah, mungkin puluhan sampai ratusan interaksi atau bisa

²² Disarikan dari Effy Wardati Maryam, Gambaran Sense of Community pada Karyawan bagian Administrasi di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (*Psikologia (Jurnal Psikologi)*, 2 (1), January 2017, 52-64)

²³ Saptana, dkk. *Transformasi Kelembagaan Tradisional*. (Bogor: PSEKP, 2003)

²⁴ Mark Granovetter and Richard Swedberg (eds), *The Sociology of Economic Life* (Oxford: Westview Press, 1992) hal 9

disebut kelembagaan sebagai interaksi yang berpola. Dari interaksi inilah dapat dipahami sebuah kelembagaan hanya dengan memahami bagaimana pola, ciri, dan bentuk sebuah interaksi dan dalam satu kelembagaan, sebagian besar interaksi berbentuk sama.

Proses pengembangan kelembagaan disini terdapat beberapa prinsip yang perlu dijadikan pegangan²⁵ yakni 1) Pahami setting masyarakat setempat, karakteristik dan konfigurasi ekonomi, politik, dan sosial setempat, serta level kolektivitas dan individualitasnya, 2) Bidang pekerjaan yang akan dilakukan, jenis, dan sifat interaksi yang ada di dalamnya, serta adanya motivasi sosial dan ekonomi yang tercampur didalamnya, 3) Pelajari kelembagaan yang sudah ada di masyarakat, aktivitas yang akan dijalankan, manfaat, dan masalah yang ada, 4) Kelompokkan basis kelembagaan yang sesuai untuk tiap aktivitas yang akan dijalankan, kecocokan, pola komunitas, pola pasar, pola pemerintah, dan basis pelayanan, 5) Pahami pula kekentalan kelembagaan yang sesungguhnya diperlukan, penguatan personal relation, personal network, dan organisasi.

Kriteria kelembagaan untuk tujuan praktis dapat dihubungkan dengan pembentukan kelembagaan dengan urutan sebagai berikut²⁶ 1) Terorganisir dan memiliki norma atau aturan yang ditegakkan, 2) Memiliki cita-cita atau tujuan yang ingin dicapai, 3) Secara konsisten melakukan suatu fungsi secara berulang dan telah dilakukan dalam jangka cukup lama, 4) Melakukan interaksi dengan lembaga lain sebagai manifestasi saling ketergantungan antar lembaga.

Metodologi Penelitian

Desain peneliti menggunakan paradigma fenomenologi dengan pendekatan kualitatif, jenis studi kasus. Data dikumpulkan dengan latar alami (*natural setting*) sebagai sumber data langsung. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap fenomena dan gejala secara mendalam, menemukan secara menyeluruh dan utuh serta mendeskripsikan, menganalisis dan memberikan interpretasi tentang Konsep

²⁵ Sudaryanto T. Sumaryanto, *Pemahaman dampak negatif konversi lahan sawah sebagai landasan perumusan strategi pengendaliannya*. dalam: Sunito S, Purwandari H, Mardiyansih DI, editor. *Penanganan Konversi Lahan dan Pencapaian Lahan Pertanian Abadi*. (Bogor (ID): Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan LPPM – Institut Pertanian Bogor, 2005). Hal: 22-32.

²⁶ Kedi Suradisastra, 2008. *Strategi Pemberdayaan Kelembagaan Petani* (Forum Penelitian Agro Ekonomi, Volume 26 No. 2, Desember 2008) hal 82-91.

Pendidikan Islam dalam Menciptakan Sistem Kelembagaan yang Harmoni. Peneliti tidak hanya berhenti pada temuan substantif sesuai dengan fokus penelitian melainkan juga temuan formal atau *thesis statement*.

Alasan pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, bahan kajian dari penelitian ini yakni makna dari sebuah tindakan atau makna apa yang terkandung dari sebuah tindakan individu dalam lingkungan tersebut. Kedua, didalam penelitian sosial yang objek kajiannya yakni individu dalam masyarakat, individu memiliki strategi yang tepat bagi dirinya, sehingga memerlukan kajian yang lebih mendalam. Sehingga, peneliti memerlukan kajian mendalam terhadap subyek kajian terhadap suatu fenomena tersebut. Ketiga, penelitian tentang Konsep Pendidikan Islam dalam Menciptakan Sistem Kelembagaan yang Harmoni memungkinkan menggunakan pendekatan kualitatif, karena yang dikaji yakni fenomena yang terjadi dalam lingkungan didasari atas sikap individu yang datang dari dalam dirinya.²⁷

Peneliti menggunakan jenis penelitian studi kasus. Studi kasus dilakukan terhadap peristiwa atau gejala yang sedang berlangsung bukan gejala atau peristiwa yang sudah berlangsung (*ex post facto*).²⁸ Menurut Creswell,²⁹ studi kasus merupakan "...a problem to be studied, which will reveal an in-depth understanding of a "case" or bounded system, which involves understanding an event, activity, process, or one or more individuals" (Sebuah permasalahan untuk dipelajari yang akan menyatakan kedalaman dari sebuah kasus atau sistem yang terbatas yang meliputi pemahaman sebuah peristiwa, aktifitas, atau proses seorang atau lebih).

Unit of analysis dari penelitian ini yakni individu-individu dan kelompok yang ada di Lempaba Pendidikan Madrasah Aliyah mamba'us Sholihin yang menjadi lokus penelitian. Dengan demikian, peneliti mengumpulkan peristiwa atau gejala yang sedang berlangsung di Lempaba Pendidikan Madrasah Aliyah mamba'us Sholihin, termasuk kegiatan yang disusun oleh Lempaba Pendidikan Madrasah Aliyah Mamba'us Sholihin. Oleh karena itu, peneliti berusaha menghimpun data, mengambil makna dan mendapat pemahaman dari kasus tersebut.

²⁷ Nur Syam. *Islam Pesisir* (Jogjakarta: Lkis, 2005) hal 25

²⁸ Mudjia Rahardjo, Perbandingan....

²⁹ John W. Creswell, Desain Penelitian (Jakarta: KIK Press, 2002), hal. 61.

Subyek penelitian yang akan digunakan dalam penlitian ini terdapat di Lempaba Pendidikan Madrasah Aliyah Mamba'us Sholihin bertempat di Jl. KH. Syafi'I no 4 Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Jawa Timur.

Selanjutnya, pengumpulan data melalui pengamatan (*observasi*), wawancara secara mendalam (*Deep interview*) tak terstruktur kepada beberapa pihak terkait seperti kepala sekolah, wakil-wakil kepala sekolah serta murid madrasah aliyah. Observasi non partisipan dilakukan agar peneliti bisa memberikan penilaian secara objektif kepada subyek penelitian dan selanjutnya dilakukan perekam dokumen (*dokumentasi*), diharapkan dapat diperoleh secara lebih lengkap, lebih dalam dan lebih dapat dipercaya, dan karena tujuan penelitian dapat tercapai. Hal ini dimungkinkan sebab dalam penelitian ini peneliti langsung berhadapan dengan sasaran peneliti. Sifat naturalistik, menjadikan peneliti berfungsi sebagai instrumen pengumpul data. Untuk itu diperlukan kemampuan menyesuaikan diri dengan berbagai ragam realitas yang tidak dapat dikerjakan oleh *non-human instrument* seperti kuesioner dan semacamnya. Dengan menggunakan peneliti sendiri sebagai instrumen penelitian, biasanya pengertian dari apa yang dimaksud peneliti dengan apa yang ditangkap sasaran penelitian, akan dapat dieliminasi.³⁰

Pembahasan

Peran Pendidikan Islam Multikultural dalam Menciptakan Sistem Kelembagaan yang Harmoni

Lembaga pendidikan merupakan suatu suatu institusi yang yang didalamnya terdapat bagian-bagian yang saling terhubung, sehingga mampu berinteraksi dan integrasi dalam mewujudkan tujuan yang di inginkan.³¹ Begitu juga dengan lembaga pendidikan Madrasah Aliyah Mamba'us Sholihin Suci Manyar Gresik. Dalam lembaga pendidikan Madrasah Aliyah Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik terdapat struktur yang sudah disepakati dimulai kepala sekolah sampai kepada siswa madrasah Aliyah.

Seluruh system dari bagian-bagian tersebut saling tergantung (*interdependensi*). Hal ini menyebabkan semua anggota memiliki

³⁰ John W. Creswell, Desainhal. 61.

³¹ Muhammad Arif Syihabuddin. "Studi Komparatif Filsafat Pendidikan Islam dan Barat." *JALIE; Journal of Applied Linguistics and Islamic Education* 1, no. 1 (2017): 68-93.

keterkaitan dan saling membutuhkan satu sama lain. Bagian-bagian dari struktur harus dipahami dalam relevansinya dengan fungsi terhadap keseimbangan sistem keseluruhan. Sehingga bagian-bagian tersebut menunjukkan gejala saling tergantung dan saling mendukung untuk memelihara keutuhan sistem³². Oleh sebab itu maka semua elemen yang ada di masyarakat haruslah bersatu untuk terciptanya kehidupan yang damai, harmoni dan tercapainya tujuan bersama.

Pembahasan dalam peneliti ini menggali lebih jauh konsep Pendidikan Multikultural dalam Menciptakan Sistem Kelembagaan yang harmoni yang didalamnya terdapat tentang nilai-nilai pendidikan multikultural yang berkembang dalam lembaga tersebut, baik nilai yang berkembang dalam interaksi guru dengan guru, siswa dengan siswa, dan guru dengan siswa. Dalam pengamatan peneliti, nilai-nilai Pendidikan Islam Multikultural yang nampak diantaranya yakni nilai *At-Tawassuth* (moderat), *At-Tasamuh* (toleran), *At-Ta'awun* (tolong-menolong), dan *At-Tawazun* (harmoni). Akan lebih jelasnya akan kami ungkap sebagaimana berikut.

Nilai-nilai *At-Tawassuth* (moderat) di Sekolah

Tawasuth merupakan sikap pengambilan jalan tengah antara dua kutub pemikiran yang ekstrem (*tatharruf*) dengan kata lain *Tawasuth* yakni moderat.³³ *Tasawuth* masuk kedalam sikap kemasyarakatan, di dalam Lembaga Pendidikan Madrasah Aliyah Mamba'us Sholihin bersama dengan yayasan Pondok Pesantren bersinergi untuk membentuk manusia yang mulia dan yang berfaham *Ahl Al-Sunnah Wal-Jama'ah* dengan menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan cinta tanah air. Untuk mengimplementasikan sikap *Tawasuth* tersebut pihak sekolah menggunakan beberapa metode, Pertama, yaitu dengan memberikan pemahaman terhadap peserta didik tentang nilai *Tawasuth* dan manfaat yang terdapat dalam nilai *Tawasuth* tersebut. berikut hasil interview dengan WaKur “tenaga Pendidik lebih memberikan pemahaman bahwa Islam di Indonesia merupakan Islam yang ramah, Islam yang mengutamakan akhlak dan budi pekerti yang lubur, kami menanamkan nilai Tawasuth kedalam pemahaman siswa, sehingga kedepannya dapat menjadi

³² Muqoyyidin, A. W. (2012). *Potret Konflik Bernuansa Agama di Indonesia*. Jurnal Analisis, 3(2). Hal 325

³³ Achmad Muhibbin Zuhri, *Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari Tentang Ahl Al-Sunnah Wal Jama'ah*, (Surabaya: Khalista & LTN PBNU, 2010), hlm. 61

pelindung dan terhindar dari faham-faham ekstrimis/radikal.”³⁴ Dari petika wawancara tersebut, peneliti sedikit memahami bahwa guru menanamkan sikap moderat tidak hanya di dalam kelas, tapi juga di luar kelas dengan jalan memberikan teladan dalam interaksi antar sesama guru.³⁵

Pemahaman akan sikap *tawasuth* siswa dapat diterapkan dalam hal-hal kecil misalnya selalu menjunjung tinggi nilai kebersamaan, bermusyawarah ketika terjadi perdebatan. Hal seperti itu yang kemudian bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Berkaitan dengan keberhasilan penanaman nilai *Tawasuth* maka peneliti melakukan wawancara dengan siswa kelas X Madrasah Aliyah Mamba’us Sholihin, mereka mengungkapkan bahwa “*Tawasuth kalan disini disebut Berpendirian kalaun di ajarkan sama H. Moh. Nauval. Teguh berpendirian disini kita harus berpegang teguh kepada pendirian sendiri, harus fokus pada diri sendiri asalkan itu benar. Tetapi tetap menghormati pendirian orang lain.*”³⁶

Upaya untuk menerapkan nilai *Tawasuth* dalam kehidupan sehari-hari juga dilakukan dengan pembiasaan yang dilakukan sehari-hari. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa *tawasuth* yakni sikap moderat yang mengutamakan garis tengah dan tanpa memihak salah satu.

Pembiasaan sikap *Tawasuth* atau moderat siswa-siswi Madrasah Aliyah Mamba’us Sholihin memang belum terlalu terlihat, karena mayoritas murid-murid Madrasah Aliyah Mamba’us Sholihin berfaham Ahlussunnah wal Jamaah An Nahdliyah semua. Jadi tidak ada gesekan maupun perbedaan faham, Akan tetapi akan sangat bermanfaat dikemudian harinya setelah dewasa dan ketika bersosial dengan masyarakat.³⁷

Hal yang sama juga diungkapkan oleh WaKur, Bapak G.1 selaku guru mata pelajaran Hadits berpendapat bahwa, pemahaman akan nilai *tawasuth* sangat diperlukan oleh siswa dalam membentuk kepribadian anak yang moderat sesuai nilai-nilai keislaman dimasyarakat. Sikap *tawasuth* dalam pembiasaan secara tidak langsung melekat dalam sikap murid di Madrasah Aliyah Mamba’us Sholihin,

³⁴ Interview dengan Wk Kurikulum Madrasah Aliyah Mamba’us Sholihin Pada Hari Ahad tanggal 13 Oktober 2019.

³⁵ Observasi di dalam lingkunga kantor Madrasah Aliyah Mamba’us Sholihin Pada Hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019.

³⁶ Hasil Interview dengan S.1 Pada Hari selasa tanggal 15 Oktober 2019.

³⁷ Hasil Interview dengan Kepala Tata Usaha Madrasah Aliyah Mamba’us Sholihin Pada Hari Rabu, 16 Oktober 2019.

dengan cara guru senantiasa memberikan keharusan setiap murid berlaku adil dan lurus ditengah berpendirian kuat kehidupan bersama. Dengan senantiasa memberikan pemahaman mengenai sikap moderat (*tawasuth*) akan menjadi pelindung dari faham yang tidak sesuai dengan norma dimasyarakat.³⁸

Setelah itu semua dilakukan, terdapat beberapa hal yang paling dominan yang dialakukan oleh guru diantaranya adalah model pembiasaan dan keteladanan guru lah yang akan menentukan keberhasilan implementasi nilai *tawasuth* tersebut. dalam metode keteladanan, guru jelas berperan penting untuk menjadi teladan bagi peserta didik dalam mewujudkan sikap *tawasuth*.

Ketika peneliti berkunjung di dalam kantor, peneliti mendapati kepala sekolah berdiskusi dengan beberapa guru dan Staf sekola guna membahas tentang hari santri, kepala sekola ingin menggali aspirasi dari warga sekolah terkait dengan penyelenggaraan hari santri yang. Peneliti melihat kepala sekolah begitu menghormati masing-masing individu terkait usulan yang di paparkan,kapala sekolah begitu antusias dan menyimak dengan telaten paparan tersebut.³⁹ Dari fenomena tersebut peneliti berkesimpulan bahwa iklim yang terjadi dalam kantor bisa di katakan baik, hal tersebut sesuai dengan QS Asy Syura' (42) ayat 38.⁴⁰

Melihat hasil observasi dan wawancara peneliti, terdapat nilai sikap *tawasuth* dalam hal akhlak yang dilakukan atau ditaati di Madrasah Aliyah Mamba'us Sholihin. Yakni dalam hal adap berpakaian guru maupun Siswa di Madrasah Aliyah Mamba'us Sholihin dalam hal ini yakni tidak berlebihan dalam menilai sesuatu, tenang dan bijak dalam mengambil sikap, serta mempertimbangan kemaslahatan. Di Madrasah Aliyah Mamba'us Sholihin tidak berlebihan, memakai pakaian yang indah dan seragam. Siswanya harus memakai peci hitam setiap hari, Modelnya sesuai dengan dunia pendidikan dan sesuai dengan nilai *tawasuth* akhlak yakni tidak berlebihan.⁴¹

³⁸ Hasil *Interview* dengan guru mata pelajara Hadits Madrasah Aliyah Mamba'us Sholihin Pada Hari selasa, 15 Oktober 2019.

³⁹ Observasi di Kantor madrasah Aliyah pada hari Kamis 3 Oktober 2019

⁴¹ Hasil Observasi di lingkungan Madrasah Aliyah Mamba'us Sholihin, pada hari Rabu, 16 Oktober 2019

Nilai-nilai *At-Tasamuh* (toleran) di Sekolah

Tasamuh termasuk kedalam sikap sosial kemasyarakatan Nahdlatul Ulama. Madrasah Aliyah Mamba'us Sholihin sebagai salah satu sekolah yang berlandaskan *Ahlussunnah Wal Jama'ah* NU, juga memasukkan nilai-nilai sikap NU kedalam kurikulum pendidikan di sekolah. Nilai *Tasamuh* diterapkan kedalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah Madrasah Aliyah Mamba'us Sholihin, tidak terkecuali dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Penerapan nilai *Tasamuh* diajarkan baik di dalam kelas maupun diluar kelas, dalam hal ini kegiatan. Hal ini disampaikan oleh WKr. bahwa:

“Nilai *tasamuh* atau bahasa sehari-hari yakni toleransi sangat jelas kita ajarkan dalam mendidik anak, disetiap mata pelajaran juga sudah terdapat nilai pendidikan akhlak yang di dalamnya meliputi toleransi. Disini kita kenalkan dengan yang namanya tri ukhuwah, yakni *ukhuwah Islamiyah*, *ukhuwah Basyariyah* dan *Ukuhwah Wathaniyah*. Dengan kebiasaan- kebiasaan toleransi tersebut nantinya diharapkan murid dapat mengimplementasikannya terhadap perilaku sosial mereka baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat.”⁴²

Senada dengan yang di ungkapkan oleh WKr, G.1 yang juga merupakan guru mata Hadits menjelaskan mengenai sikap *tasamuh* sebagai berikut:

“Proses pemahaman yang dilakukan oleh guru tidak hanya dilakukan dalam proses kegiatan pembelajaran di dalam kelas, namun juga di luar kelas juga. Telah kita ketahui bahwa toleransi masuk kedalam pendidikan karakter yang digagas oleh pemerintah akhir-akhir ini. Jadi sejalan dengan nilai *Tasamuh* yang sudah ada di dalam kurikulum Madrasah Aliyah Mamba'us Sholihin. Nilai-nilai tersebut sangatlah penting dalam membentuk kepribadian anak yang berlandaskan *ahlussunnah wal Jama'ah*, jangan sampai siswa-siswi disini masuk kedalam faham-faham radikal yang *intoleran*, tidak mempunyai nilai toleransi.”⁴³

⁴² Interview dengan Waka Kurikulum Madrasah Aliyah Mamba'us Sholihin pada hari Rabu, 16 Oktober 2019.

⁴³ Interview dengan Guru Mata Pelajaran Hadits Madrasah Aliyah Mamba'us Sholihin pada Pada Hari Rabu, 16 Oktober 2019.

Dengan pemahaman yang sudah didapatkan oleh murid tentang *tasamuh* selanjutnya murid sendiri yang harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari segi pembiasaan dalam penerapan nilai *Tasamuh*, Madrasah Aliyah Mamba'us Sholihin membiasakan siswasiswinya untuk selaku melakukan sikap *tasamuh*. Pembiasaan tersebut misalnya, tidak membeda-bedakan sesama teman, saling menghormati terhadap sesama, hormat terhadap guru, dan pembiasaan baik lainnya. Hal ini disampaikan oleh G.1 selaku guru mata pelajaran Hadits Madrasah Aliyah Mamba'us Sholihin, bahwa:

“Madrasah Aliyah Mamba'us Sholihin sejak awal sangat menekankan sikap toleransi hal ini dibangun dengan dasar nilai *Tasamuh*, penerapan sikap *Tasamuh* dalam pembiasaan siswa sehari- hari, pihak sekolah maupun yayasan mengarahkan dan memantau secara langsung perilaku anak, sikap yang diajarkan yakni saling menghormati dan menghargai antar sesama peserta didik, baik berupa perbedaan faham ataupun pendapat”⁴⁴

Bentuk pembiasaan yang dilakukan di Madrasah Aliyah Mamba'us Sholihin mengenai sikap *tasamuh* antara lain: 1) Pembiasaan siswa kepada guru harus 5-S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan Santun), 2) Berbicara sopan dan santun kepada guru maupun sesama murid, 3) Ikut dalam kerja bakti, atau kebersihan berupa piket kelas setiap hari, 4) *Takziyah* ketika ada orang tua murid/kolegan guru yang meninggal⁴⁵

Pembiasaan atau bisa disebut aktifitas yang spontan yang dilakukan oleh peserta didik pada saat itu juga. Apabila guru mendapati perilaku dan sikap yang kurang baik, saat itu juga guru harus melakukan koreksi sehingga murid tidak akan melakukan tindakan yang kurang baik. dalam kaitannya dengan *tasamuh* bisa dimulai dari hal yang kecil misalnya, tidak bergurau di kelas sehingga mengganggu siswa lain yang sedang belajar, berkelahi, bicara tidak sopan dan sebagainya.

Selain itu, peneliti menemukan suatu bentuk perilaku yang termasuk kategori *Tasamuh* di Madrasah Aliyah Mamba'us Sholihin, hasil observasi peneliti melihat sikap sopan santun, rendah hati

⁴⁴ Interview dengan Guru Mata Pelajaran Hadits Madrasah Aliyah Mamba'us Sholihin pada Selasa tanggal 15 Oktober 2019..

⁴⁵ Observasi lapangan yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah Mamba'us Sholihin, Pada Hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019.

(*tawadhu*) dengan siapapun berada. Hal ini dibuktikan dengan kedatang peneliti di dalam kantor ketika bertemu untuk pengambilan data, peneliti disambut dengan ramah oleh beberapa guru dan juga Staf sekolah. Tidak hanya itu, peneliti juga melihat siswa bersalaman dengan Bapak guru ketika masuk kelas.⁴⁶

Pembentukan akhlak siswa dalam implementasi nilai tasamuh juga diperlukan peran serta guru untuk memberikan contoh dan teladan yang baik sehingga diharapkan dapat menjadi panutan bagi semua murid. Disini Madrasah Aliyah Mamba'us Sholihin menggunakan metode keteladanan agar murid dapat mencontoh sikap dan perilaku yang baik dari para guru. Keteladanan langsung maupun tidak langsung juga diberikan pemahaman terhadap murid. Hal ini disampaikan oleh G.2 selaku tenaga pengajar Hadits, bahwa:

“Bentuk keteladanan guru dalam nilai *Tasamuh* yakni tidak membeda-bedakan peserta didik, walaupun dari faham yang berbeda maupun keadaan sosial yang berbeda, tidak adanya diskriminasi antara murid dari pondok pesantren maupun dari luar pondok pesantren. Dan juga antara anak yang berasal dari orang tua yang mampu, maupun murid dari orang tua yang kurang mampu. bentuk dari pelaksanaan keteladanan ini dengan guru sebagai contoh sikap yang baik terhadap murid-murid. semua ini kaitannya dengan membentuk sikap-sikap yang baik terhadap murid-murid Madrasah Aliyah Mamba'us Sholihin.”⁴⁷

Melihat dari hasil wawancara dan juga observasi yang telah peneliti lakukan, peneliti berkesimpulan bahwa nilai *Tasamuh* merupakan nilai yang menjadikan lembaga ini menjadi lembaga yang harmoni, hal itu bisa di lihat dari bagaimana sekolah tidak membedakan antara siswa pondok dan non pondok, dan juga ketika peneliti memasuki ruangan kantor, peneliti disambut dengan hangat dan tidak diperlakukan seperti orang luar.

Nilai-nilai *At-Ta'awun* (tolong-menolong) dalam Sekolah

⁴⁶ Observasi lapangan yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah Mamba'us Sholihin, Pada Hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019.

⁴⁷ Interview dengan Mata Pelajaran Hadits di Madrasah Aliyah Mamba'us Sholihin Pada Hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019.

Analisis ini mencangkup Nilai tolong menolong (ta'awun) yang muncul dalam Lembaga Sekolah, berdasarkan Hasil wawancara dengan beberapa responden menyimpulkan bahwa nilai-nilai tololng menolong (ta'awun) muncul pada beberapa kegiatan di lembaga Pendidikan Madrasah Aliyah mamba'us Sholihin yakni sebagai berikut: pertama, Sikap Peduli Sosial. Sikap peduli sosial merupakan sikap dan tindakan yang selalui ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. seperti memberikan pertolongan pertama untuk menangani siswa yang sakit dalam berbagai kegiatan di sekolah, melakukan bakti sosial, dan membantu kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang dilakukan di sekolah.

Gotong royong, merupakan kemampuan bekerjasama untuk memperjuangkan kebaikan bersama bagi masyarakat luas, terutama yang sangat membutuhkan, marginal dan terabaikan di dalam masyarakat. Dalam kegiatan ekstrakurikuler lembaga Pendidikan Madrasah Aliyah mamba'us Sholihin, siswa dilatih untuk memiliki jiwa yang suka membantu sama lain atau gotong royong dalam melaksanakan suatu tugas secara bersama-sama dengan penuh suka rela. Karena dengan gotong royong maka akan timbul kebersamaan dalam dalam keikhlasan, tanpa saling memanfaatkan tetapi saling memberi dukungan, membantu dan menolong, dalam menciptakan kebaikan demi bakti kepada lingkungan masyarakat sekitar.

Kerjasama, merupakan kerja bareng antar sesama atau lembaga untuk melakukan suatu kegiatan yang saling menguntungkan bagi pihak satu dengan yang lainnya. Contoh Kegiatan ini di dalam lembaga Pendidikan Madrasah Aliyah mamba'us Sholihin yakni bekerjasama dengan lembaga lain yaitu kegiatan bakti sosial dalam penggalangan dana korban bencana banjir pada kecamatan Cerme dan juga Benjeng pada tahun 2018 kemarin.

Tanggung jawab, merupakan yakni sikap dan perilaku yang penting dalam kehidupan karena dengan adanya tanggung jawab seseorang akan berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan, sehingga perbuatan yang dilakukannya akan bernilai positif baik bagi dirinya maupun orang lain. Di dalam kegiatan lembaga Pendidikan Madrasah Aliyah mamba'us Sholihin melatih siswa yang kurang memiliki rasa tanggung jawab, dapat dijadikan wadah penanaman nilai tanggung jawab.

Nilai-nilai *At-Tawazun* (harmoni) dalam Sekolah

Tawazun maksudnya selalu menjaga keseimbangan dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan dalil ‘*aqli* (dalil yang bersumber dari akal pikiran rasional) dan dalil *naqli* (bersumber dari Al-Qur'an dan hadits), termasuk juga seimbang dalam kepentingan dunia dan akhirat.

Metode yang digunakan dalam implementasi nilai *Tawazun* yakni penggabungan beberapa metode yang *Pertama* yakni metode pemahaman. *Kedua*, yakni metode Pembiasaan, dan yang *Ketiga*, yakni metode Keteladanan. Hal ini disampaikan saat *interview* dengan G.3, Guru Mata Pelajaran Aswaja Madrasah Aliyah Mamba'us Sholihin, sebagai berikut:

“Madrasah Aliyah Mamba'us Sholihin yakni sekolah yang memadukan ilmu agama dan ilmu umum, keseimbangan nilai *Tawazun* tanpa disadari sudah melekat pada Madrasah Aliyah Mamba'us Sholihin, dalam kaitannya dengan pemahaman pada peserta didik, guru selalu memberikan pengertian bahwa mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, keseimbangan antara dunia dan akhirat juga sangat diutamakan. Pembiasaan- pembiasaan yang dilakukan juga dengan senantiasa menyeimbangkan perkara akhirat dan dunia.”⁴⁸

Sikap *Tawazun* di Madrasah Aliyah Mamba'us Sholihin yakni bisa terlihat dengan struktur kurikulum yang memadukan pelajaran umum dan agama yang seimbang. Pelaksanaan kegiatan harian juga ikut mendorong murid untuk berperilaku *tawazun*, dengan pembiasaan membaca Al- Qur'an, sholat dhuha, Sholat dhuhur berjama'ah, dan gemar berinfaq.

Catatan Akhir

Kelembagaan merupakan suatu tingkat kekekalan atau kemapanan aturan main (*the rules*) dalam suatu kelembagaan juga telah berlaku dalam waktu yang cukup lama, dan mungkin masih akan berlaku dalam jangka waktu yang lama lagi, di sisi yang lain lembaga juga bisa di artikan sebuah Institusi yang di dalamnya terdapat organisme yang satu sama lain saling menyokong guna mencapai tujuan yang di inginkan bersama.

⁴⁸ *Interview* dengan Guru Mata Pelajaran Aswaja di depan ruang guru madrasah Aliyah Pada Hari Ahad tanggal 10 November 2019.

Kelembagaan yang baik merupakan lembaga yang bisa mewujudkan visi misi yang telah di canangkan, dalam mewujudkan misi tersebut dibutuhkan harmonisasi antar individu maupun kelompok. Harmonisasi tersebut bisa di raih dengan implementasi nilai-nilai Pendidikan Islam Multikultural yakni nilai-nilai *At-Tawassuth* (moderat), *At-Tasamuh* (toleran), *At-Ta'awun* (tolong-menolong), dan *At-Tawazun* (harmoni) dalam interaksi lingkungan sekolah.

Daftar Pustaka

- Bakri. Maskuri dan Dyah Werdiningsih, *Membumikan Nilai Karakter Berbasis Pesantren* (Jakarta: Nirma Media, 2017) hal 109-123
- Banks. James A. and Cherry A. McGee Banks, *Multicultural Educational: Issues and Perspectives* 7 ed. (New Jersey:John Wiley & Sons, 2010)
- Creswell. John W. *Desain Penelitian* (Jakarta: KIK Press, 2002).
- D. C. North, *Institutions, Institutional Change and Economics Performance*, (Cambridge University Press, 1990),
- E. Daniel Hebding, and Leonard Glick, *Introduction to Sociology: A Text with Readings*, (Pilipina: Hill Inc dan Philipine Graphic Art Inc, 1994)
- Elizabeth. Rosganda, *Penguatan dan Pemberdayaan Kelembagaan Petani Mendukung Pengembangan Agribisnis Kedelai*. (Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. PUSLITBANGTAN, 2010)
- Granovetter. Mark and Richard Swedberg (eds), *The Sociology of Economic Life* (Oxford: Westview Press, 1992).
- Hamid, Farid dan Heri Budianto, *Ilmu Komunikasi: Sekarang dan Tantangan Masa Depan* (Jakarta: Kencana, 2011)
- Hasan. Muhammad Tholchah, *Pendidikan Multikultural: Sebagai Opsi Penanggulangan Radikalisme*, (Malang: Lembaga Penerbitan Universitas Islam Malang, 2016)
- Horton, Paul B. and Chester L. Hunt, *Sociology* (McGraw-Hill College, 1984)
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat: edisi ketiga*, (Jakarta: Grafindo Pustaka Utama, 1997)

- L. Gillin, J. dan J.P. Gillin, *Cultural Sociology*. (New York: The Me Millan Co, 1954)
- Maryam. Effy Wardati, *Gambaran Sense of Community pada Karyawan bagian Administrasi di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo* (Psikologia (Jurnal Psikologi), 2 (1), January 2017, 52-64)
- Muizzuddin, M. "Pendidikan Humanis dalam Prespektif Islam (Implementasi Nilai-Nilai Ketauhidan dalam Pembelajaran)." *JALIE; Journal of Applied Linguistics and Islamic Education* 1, no. 1 (2017): 115-132.
- Ostrom, E. *Governing of the Common. The Evolution of Institutions for Collective Action*, (Cambridge University Press, 1990).
- Saptana, dkk. *Transformasi Kelembagaan Tradisional*. (Bogor: PSEKP, 2003)
- Syihabuddin, Muhammad Arif. "Studi Komparatif Filsafat Pendidikan Islam dan Barat." *JALIE; Journal of Applied Linguistics and Islamic Education* 1, no. 1 (2017): 68-93.
- Schotter. Andrew, *The Economic Theory of Social Institutions*, (New York : Cambridge University Press, 1981) hlm. 78.
- Sudaryanto T. Sumaryanto, *Pemahaman dampak negatif konversi lahan sawah sebagai landasan perumusan strategi pengendaliannya*. dalam: Sunito S, Purwandari H, Mardiyansih DI, editor. *Penanganan Konversi Lahan dan Pencapaian Lahan Pertanian Abadi*. (Bogor (ID): Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan LPPM – Institut Pertanian Bogor, 2005).
- Suradisastra. Kedi, 2008. *Strategi Pemberdayaan Kelembagaan Petani* (Forum Penelitian Agro Ekonomi, Volume 26 No. 2, Desember 2008)
- Syam. Nur, *Islam Pesisir* (Jogjakarta: Lkis, 2005).
- Uphoff. Norman, *Local Institutions and Participation for Sustainable Development*. (London: Gatekeeper Series SA31. IIED. 1992)
- W. Muqoyyidin, A. *Potret Konflik Bernuansa Agama di Indonesia*. (Jurnal Analisis, 3(2). (2012).

M. Muizzuddin, Ahsantudhoni

Zuhri. Achmad Muhibbin, *Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari Tentang Ahl Al-Sunnah Wal Jama'ah*, (Surabaya: Khalista & LTN PBNU, 2010)